

## Analisis Kesiapan Sumber Daya Dalam Mitigasi Kebakaran Pos Pemadam Kebakaran Tropodo Sidoarjo

Keista Romadhona Tribuana<sup>1</sup>, Nazwa Aulia Syafira<sup>2</sup>, Farah Auliya Ludjiansjah<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur, Surabaya

E-mail: [123041010158@student.upnjatim.ac.id](mailto:123041010158@student.upnjatim.ac.id), [223041010217@student.upnjatim.ac.id](mailto:223041010217@student.upnjatim.ac.id),  
[323041010224@student.upnjatim.ac.id](mailto:323041010224@student.upnjatim.ac.id)

### ABSTRAK

Kawasan permukiman padat penduduk dan industri seperti Tropodo memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana kebakaran akibat akses jalan yang sempit, sehingga menuntut kesiapan operasional yang optimal dari pos pemadam terdekat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, serta strategi operasional mitigasi kebakaran di Pos Pemadam Kebakaran Tropodo, Sidoarjo. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang berfokus pada variabel sumber daya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi dengan sampel informan utama berupa Komandan Regu dan personel pos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM secara kualitas sudah kompeten dan tersertifikasi, namun secara kuantitas masih kurang karena hanya terdapat lima personel per regu siaga. Kesiapan sarana prasarana cukup memadai, tetapi terhambat keterbatasan anggaran pembaruan Alat Pelindung Diri (APD) dan ketiadaan armada taktis untuk menjangkau kawasan padat bergang sempit. Strategi operasional yang diterapkan mencakup *shift* 24 jam, layanan *Call Center* 112, serta edukasi masyarakat, meski terkendala kemacetan dan laporan palsu. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah daerah perlu menambah personel lapangan, mengalokasikan anggaran khusus pembaruan sarana prasarana termasuk armada kecil, serta mengoptimalkan edukasi masyarakat terkait proteksi kebakaran mandiri.

**Kata kunci :** *Mitigasi Kebakaran, Kesiapan Sumber Daya, Pos Pemadam Kebakaran*

### ABSTRACT

Densely populated residential and industrial areas like Tropodo have a high vulnerability to fire disasters due to narrow road access, thus demanding optimal operational readiness from the nearest fire station. This study aims to analyze the readiness of human resources, facilities and infrastructure, and operational strategies for fire mitigation at the Tropodo Fire Station, Sidoarjo. This descriptive qualitative research utilizes George C. Edwards III's policy implementation theory, focusing strictly on the resource variable. Data were collected through in-depth interviews, direct observations, and documentation, with the Squad Commander and station personnel serving as the primary sample. The findings indicate that while the human resources are qualitatively competent and certified, there is a significant quantitative shortage with only five personnel available per standby shift. Facilities are generally adequate but constrained by budget limitations for updating Personal Protective Equipment (PPE) and the lack of tactical fleets to access densely populated areas with narrow alleys. Operational strategies implemented include 24-hour shifts, utilization of the 112 Call Center, and community education, although challenges like traffic congestion and prank calls persist. The study recommends that the local government increase the number of field personnel, allocate specific budgets for PPE renewal and compact fire trucks procurement, and optimize community education regarding independent fire protection.

**Keyword :** *Fire Mitigation, Resource Readiness, Fire Station*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, baik akibat faktor alam maupun non-alam. Di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan bangunan yang berhimpitan, kebakaran menjadi salah satu ancaman bencana non-alam yang rutin terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, peristiwa kebakaran mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan serangkaian upaya mitigasi yang terencana guna meminimalisasi kerugian material serta korban jiwa. Mitigasi kebakaran di wilayah urban yang kompleks ini sangat bergantung pada kesiapan pos pemadam kebakaran sebagai garda terdepan pelayanan publik darurat.

Secara normatif, upaya tersebut harus ditunjang oleh kesiapan sumber daya operasional. Kualitas sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran yang mewajibkan kecakapan teknis, keterampilan penyelamatan, serta kesiapan fisik maupun mental (kemendagri, 2020). Pada tingkat regulasi daerah, Provinsi Jawa Timur mengaturnya melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Penyelenggaraan lebih teknis diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 terkait pembagian kewenangan antar instansi (termasuk peran BPBD Sidoarjo).

Meskipun dasar hukum telah ada, tantangan pemenuhan layanan masih terlihat secara nyata di lapangan. Pada tahun 2024, di Kabupaten Sidoarjo hanya terdapat 6 pos pemadam kebakaran aktif (Buduran, Krian, Candi, Waru, Porong, dan Sidoarjo Kota) dari total 18

kecamatan (Sidoarjonews, 2025). Total armada taktis yang tersedia juga masih kurang optimal, yakni hanya 13 unit untuk mencakup keseluruhan wilayah Sidoarjo (Gunawan & Sukmana, Hendra, 2025).

Tingkat kerawanan dan beban kerja petugas tergambar secara jelas pada data Gambar 1.1

*Gambar 1 Infografis Kebakaran Dan Penyelamatan Evakuasi Oleh BPBD Kab. Sidoarjo*



Sumber: (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025).

Berdasarkan infografis tersebut, selama periode 1 Januari hingga 30 September 2025 telah terjadi total 227 kejadian kebakaran di Kabupaten Sidoarjo. Penyebab utamanya didominasi oleh faktor lain-lain sebanyak 205 kasus dan sisanya karena faktor listrik dan lain sebagainya. Rentetan kebakaran tersebut mengakibatkan tingkat kerusakan bangunan berupa 2 bangunan rusak ringan, 10 rusak sedang, dan 3 rusak berat, serta menimbulkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 7 orang luka-luka. Selain memadamkan api, pos pemadam juga menangani tingginya intensitas penyelamatan di masyarakat, dengan rincian: evakuasi hewan (378 kejadian), pohon tumbang (48 kejadian), pelepasan cincin (35 evakuasi), kecelakaan air (5 evakuasi), borgol (3 evakuasi), dan evakuasi lain-lain (41 kejadian). Data metadata statistik oleh Badan Pusat Statistik (2025) turut menegaskan bahwa tingginya kompleksitas operasi lapangan tersebut menuntut pemenuhan standar

kualifikasi petugas, kesiapan alat, serta capaian waktu tanggap secara paripurna.

Jika membedah pada level kewilayahan, Kecamatan Waru menduduki wilayah dengan frekuensi kebakaran tertinggi kedua (37 kejadian pada periode Januari-Agustus 2024), mengingat padatnya permukiman dan tingginya sentra pabrik di area tersebut. Desa Tropodo, yang berada di Kecamatan Waru, menjadi salah satu wilayah paling rawan yang memiliki hambatan tata ruang berupa akses gang sempit. Beberapa rentetan kejadian krusial di Tropodo antara lain: kebakaran pabrik sepatu di Wadungasri pada 9 Maret 2022 yang memicu kemacetan total (Sidoarjoterkini.com, 2022), kebakaran permukiman pada 19 September 2024 (Sidoarjoterkini.com, 2024), serta kebakaran gudang rongsokan dan kos-kosan di gang sempit Jalan Tamasa pada 4 Februari 2026 yang menyulitkan penetrasi unit truk pemadam (iNewsSidoarjo.id, 2026).

Sejauh ini, penelitian terkait kebakaran sebagian besar hanya berfokus pada analisis kebijakan daerah secara makro. Kajian yang menitikberatkan langsung pada kesiapan sumber daya operasional unit (SDM, sarana prasarana, dan strategi teknis) khususnya dalam menghadapi tantangan tata ruang urban yang sempit seperti Pos Pemadam Kebakaran Tropodo masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian mendalam ini dilaksanakan untuk memotret realitas lapangan sekaligus menganalisis efektivitas kesiapan sumber daya di pos tersebut

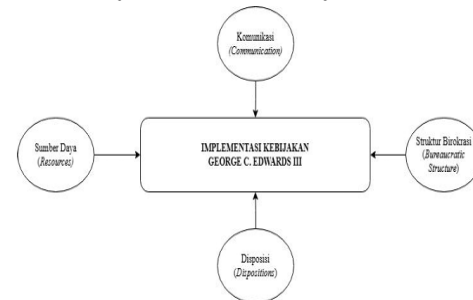
## 2. LANDASAN TEORI

### Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

*Gambar 2 Teori Implementasi George C. Edwards III berdasarkan buku "Formulasi*

*dan Implementasi Kebijakan Publik" karya Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si.*



Sumber: Yulianto Kadji (dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, 2020, hlm. 63), diadaptasi dari model implementasi kebijakan George C. Edwards III.

Berikut adalah deskripsi dari bagan struktur tersebut:

a) **Komunikasi (Communication)**

Implementasi yang efektif mensyaratkan para pelaksana untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Pesan atau perintah kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kebingungan di tingkat implementor.

b) **Sumber Daya (Resources)**

Sekalipun perintah kebijakan sudah jelas, implementasi tetap tidak akan efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk menjalankan tugasnya. Variabel ini meliputi kecukupan staf, keahlian, informasi, kewenangan, serta fasilitas pendukung.

c) **Disposisi (Dispositions)**

Merupakan sikap atau kecenderungan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Keberhasilan bergantung pada apakah para implementor memiliki keinginan dan komitmen untuk menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan aslinya.

d) **Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)**

Struktur organisasi birokrasi memiliki dampak signifikan, di mana kelemahan dalam struktur seperti kurangnya Standard Operating

Procedures (SOP) atau koordinasi dapat menghambat jalannya implementasi.

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna memotret dan menganalisis secara mendalam fenomena lapangan terkait kesiapan operasional mitigasi kebakaran di Pos Pemadam Kebakaran Tropodo, Kabupaten Sidoarjo. Secara teoretis, analisis didasarkan pada Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, dengan batasan fokus pada variabel sumber daya (*resources*) yang mencakup kesiapan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan sarana dan prasarana, serta penerapan strategi operasional. Proses pengumpulan data dilakukan secara komprehensif dengan turun langsung ke lapangan melalui wawancara mendalam terhadap informan utama yakni Komandan Regu (Danru) dan para personel pos pemadam kebakaran. Pengumpulan data juga didukung oleh observasi langsung terhadap fasilitas, kelayakan armada taktis, dan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD), serta studi dokumentasi. Guna memastikan tingkat keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan menyalangkan dan membandingkan kesesuaian informasi dari hasil wawancara, observasi, dan bukti dokumentasi. Selanjutnya, keseluruhan data dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data untuk memfokuskan temuan pada variabel sumber daya, penyajian data secara deskriptif, hingga tahap akhir berupa penarikan kesimpulan mengenai tingkat kesiapan pos pemadam kebakaran.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Ditinjau dari Permendagri Nomor 16 Tahun 2009

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam keberhasilan mitigasi

kebakaran. Secara normatif, Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran mengisyaratkan bahwa petugas pemadam wajib memiliki kemampuan teknis pemadaman, keterampilan penyelamatan (*rescue*), serta kesiapan fisik dan mental yang tersertifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara, Pos Pemadam Kebakaran Tropodo memiliki total 26 personel yang terdiri atas 24 personel lapangan serta 2 personel pendukung yaitu 1 komandan dan 1 administrasi. Meskipun demikian, jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan ideal pelayanan. Dalam kondisi siaga, setiap regu hanya terdiri dari lima personel, sedangkan kebutuhan ideal mencapai sepuluh personel per regu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah personel yang tersedia dengan kebutuhan operasional di lapangan. Dari aspek kualitas SDM, seluruh personel telah mengikuti pelatihan dasar pemadam kebakaran (*Firefighter 1/F1*)

Tabel 1 Jumlah Personel Pada Pos Pemadam Kebakaran Tropodo

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Danton (Komandan)	1 (Satu)
2.	Administrasi	1 (Satu)
3.	Anggota	24 (Dua Puluh Empat)

Sumber : Hasil Observasi Peneliti, 2026.

Beberapa personel juga memiliki jenjang pelatihan lanjutan seperti F2 dan F3 yang memungkinkan mereka menjadi instruktur maupun pelatih bagi personel lainnya. Meskipun secara kualitas regulasi Permendagri No. 16/2009 telah terpenuhi melalui standardisasi diklat, secara kuantitas terjadi kesenjangan (*gap*) yang sangat lebar antara jumlah personel riil dengan kebutuhan ideal operasional. Kondisi siaga yang hanya mengandalkan 5 personel per regu sangat tidak ideal untuk mengoperasikan 2 unit armada truk

pemadam secara simultan. Jika terjadi kebakaran skala besar (large fire) di kawasan industri atau pemukiman padat Tropodo, keterbatasan jumlah personel ini memicu terjadinya over-exhaustion (kelelahan ekstrim) dan menurunkan efisiensi taktis pemadaman di lapangan. Ditinjau dari Permendagri No. 16 Tahun 2009, SDM Pos Damkar Tropodo "Siap secara Kualitas atau Kompetensi, namun Rapuh secara Kuantitas". Keterbatasan staf ini menjadi salah satu faktor penghambat utama implementasi pelayanan prima sub urusan kebakaran di Kecamatan Waru.

Selain kompetensi teknis, pengalaman kerja juga menjadi modal penting dalam mendukung kesiapan SDM. Informan utama menyampaikan bahwa sebagian personel memiliki pengalaman kerja yang panjang sehingga mampu mengambil keputusan secara cepat dalam kondisi darurat. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi terutama saat terjadi kebakaran besar yang membutuhkan pengerahan tenaga dalam waktu lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kualitas SDM Pos Tropodo tergolong siap, tetapi secara kuantitas masih belum memenuhi kebutuhan ideal pelayanan kebakaran.

#### **Kesiapan Sarana dan Prasarana**

Kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan kebakaran. Berdasarkan hasil penelitian, Pos Pemadam Kebakaran Tropodo memiliki dua unit armada (truk) pemadam kebakaran yang digunakan untuk melayani wilayah Kecamatan Waru dan sekitarnya. Jumlah ini dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah manajemen kebakaran dan tingginya tingkat kepadatan bangunan di area Tropodo. Selain itu tersedia berbagai perlengkapan operasional seperti selang pemadam, nozzle, alat rescue, APD tahan panas, APD tahan api, tabung oksigen,

serta satu unit motor untuk pertolongan pertama.

Namun demikian, informan menyatakan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang ada masih belum ideal. Beberapa APD dan peralatan operasional mengalami keterbatasan jumlah maupun kualitas akibat keterbatasan anggaran pengadaan pada budgetary resources (anggaran pengadaan daerah), sehingga pembaruan safety equipment petugas berjalan lambat. Hal ini berpotensi mengancam keselamatan kerja petugas saat melakukan penetrasi ke titik api (fire hunting), seperti APD yang bolong-bolong, tipis karena faktor usia pakai (wear and tear), dan sudah kusam. Selang yang bolong tertembal (bocor).

Selain itu, karakteristik wilayah Tropodo yang didominasi gang sempit menyebabkan mobil pemadam kebakaran tidak selalu dapat menjangkau titik kebakaran secara langsung. Dimensi truk pemadam kebakaran berkapasitas besar yang dimiliki Pos Tropodo menciptakan ketidaksesuaian (mismatch) dengan kondisi geografis lapangan. Ketika terjadi kebakaran di area dalam gang permukiman padat (seperti insiden kebakaran gudang rongsokan di Jalan Tamasa pada Februari 2026), truk pemadam besar tidak dapat melakukan penetrasi langsung ke lokasi (point of origin). Akibatnya, petugas terpaksa menggelar selang pemadam (hose laying) yang sangat panjang, yang secara mekanis menurunkan tekanan air (friction loss) dan membuang waktu krusial.

Kendala ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan mitigasi kebakaran. Dalam aspek sumber air, Pos Tropodo memiliki dukungan yang cukup kuat berbasis kolaborasi komunitas. Melalui hubungan historis pendirian pos, pihak pos bekerja sama dengan paguyuban industri sekitar (sekitar 25 pabrik) dan PDAM untuk memanfaatkan tangki air dan hidran mandiri milik pabrik-pabrik tersebut

sebagai sarana pengisian ulang (water replenishment) yang cepat.

Secara umum, kesiapan sarana dan prasarana dapat dikategorikan tidak memadai untuk mendukung operasional sehari-hari, masih terdapat kebutuhan peningkatan terutama pada pengadaan APD, armada pendukung gang sempit, dan modernisasi peralatan pemadam kebakaran.

### **Strategi Operasional dan Dukungan Informasi**

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, target response time (waktu tanggap) pelayanan kebakaran nasional ditetapkan maksimal 15 menit (mencakup: menerima laporan, persiapan pasukan < 5 menit, perjalanan ke lokasi, hingga set-up penyemprotan air pertama). Di tengah kemacetan kronis dan hambatan lalu lintas wilayah pinggiran urban Sidoarjo-Surabaya (Waru), Pos Tropodo menerapkan rekayasa strategi operasional dan pemanfaatan sistem informasi.

Salah satu strategi utama untuk memangkas waktu perjalanan yang terhambat oleh kemacetan jam sibuk dan penutupan portal gang oleh warga, Pos Tropodo menerapkan tiga lapis strategi. Personel dibagi dalam beberapa regu yang bertugas secara bergantian selama 24 jam sehingga kesiapsiagaan pelayanan tetap terjaga setiap waktu guna menjamin kesiapsiagaan personel dan pemanasan mesin armada tanpa adanya jeda waktu operasional (zero downtime). Ketika terjadi kebakaran besar yang tidak dapat ditangani oleh satu pos, dilakukan koordinasi dan permintaan bantuan kepada pos pemadam kebakaran lain di Kabupaten Sidoarjo. Bahkan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan koordinasi lintas wilayah dengan Kota Surabaya setelah melalui prosedur yang berlaku. Dari aspek informasi, Pos Tropodo memanfaatkan layanan Call Center 112 sebagai sistem pelaporan darurat.

Dimulai pada penerimaan laporan darurat dari masyarakat dikonsolidasikan

oleh operator 112 dan diteruskan secara real-time ke Pos Tropodo. Lalu Komandan Regu melakukan verifikasi cepat untuk mengeliminasi potensi laporan palsu (prank call) yang kerap menjadi distorsi informasi di lapangan. Setelah lokasi valid, perintah pemberangkatan armada langsung dikeluarkan tanpa birokrasi yang berbelit, sesuai dengan SOP baku BPBD Kabupaten Sidoarjo. Melalui sistem tersebut laporan masyarakat dapat diteruskan secara cepat kepada instansi yang berwenang sehingga mempercepat proses respons.

Selain itu, petugas juga aktif melaksanakan edukasi kepada masyarakat mengenai penanganan kebakaran dini menggunakan peralatan sederhana yang tersedia di lingkungan sekitar. Warga dilatih menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau alat tradisional. Strategi ini bertujuan agar masyarakat mampu melakukan penanganan awal (initial containment) saat api masih berada pada fase incipient (kecil), sehingga laju perambatan api dapat ditekan sebelum armada pos tiba di lokasi kejadian. Strategi ini bertujuan mengurangi risiko meluasnya kebakaran sebelum petugas tiba di lokasi. Meski demikian, masih terdapat hambatan berupa laporan palsu (prank call), keterlambatan pelaporan dari masyarakat, serta kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk memberikan prioritas kepada kendaraan pemadam kebakaran saat menuju lokasi kejadian.

### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, kesiapan sumber daya mitigasi kebakaran di Pos Pemadam Kebakaran Tropodo secara keseluruhan berada pada kategori cukup siap, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah kendala teknis. Dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), personel yang bertugas terbukti telah memenuhi standar kualitas operasional, didukung oleh sertifikasi pelatihan dasar pemadam kebakaran (Firefighter 1/F1) serta pengalaman panjang di lapangan. Namun, keunggulan kompetensi

tersebut berbanding terbalik dengan kuantitas anggota; pembagian regu siaga yang hanya diisi sekitar lima personel per shift jauh dari kebutuhan ideal sepuluh personel memicu tingginya beban kerja dan potensi kelelahan saat menangani insiden berskala besar . Pada aspek sarana dan prasarana, pos ini sejatinya telah ditunjang oleh kelengkapan armada, Alat Pelindung Diri (APD), peralatan penyelamatan (rescue), dan suplai air dari kawasan pabrik terdekat . Sayangnya, tingkat efektivitas fasilitas ini tereduksi oleh minimnya alokasi anggaran daerah untuk pembaruan alat pelindung yang usang, serta dimensi truk pemadam yang kurang relevan untuk bermanuver menembus karakteristik tata ruang Tropodo yang dipenuhi gang sempit.

Untuk menyasiasi keterbatasan personel dan infrastruktur tersebut, Pos Pemadam Kebakaran Tropodo telah menerapkan strategi operasional yang responsif dan terintegrasi . Strategi manajerial ini diwujudkan melalui pemberlakuan sistem kerja shift 24 jam, pemanfaatan layanan aduan cepat Call Center 112, koordinasi lintas pos saat terjadi kebakaran masif, hingga langkah preventif berupa edukasi penanganan api dini kepada masyarakat . Walaupun kerangka strategi ini telah dirancang secara sistematis, kelancaran eksekusi di lapangan kerap terhambat oleh faktor eksternal, seperti kemacetan lalu lintas yang memperburuk waktu tanggap (response time), keterlambatan laporan insiden, hingga maraknya laporan palsu (prank call) . Sebagai konklusi akhir, demi mewujudkan standar pelayanan dasar yang optimal, pemerintah daerah dituntut untuk segera merealisasikan penambahan rasio personel, mengalokasikan anggaran khusus bagi sarana prasarana (terutama armada taktis yang lebih kecil), serta memperkuat sinergi dengan masyarakat guna mengurangi hambatan operasional di lapangan.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel jurnal penelitian yang berjudul "Analisis Kesiapan Sumber Daya dalam Mitigasi Kebakaran Pos Pemadam Kebakaran Tropodo Sidoarjo" ini dapat diselesaikan dengan baik . Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan,

bantuan, serta arahan selama proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing, Dra. Sri Wibawani, M.Si., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan artikel . Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo, Bapak Roni selaku Komandan Regu Pos Pemadam Kebakaran Tropodo beserta jajaran, serta seluruh informan penelitian yang telah bersedia memberikan izin, keterbukaan informasi, dan membantu kelancaran penelitian ini.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, segenap anggota tim penyusun, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun motivasi tiada henti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik . Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan kajian manajemen bencana perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aronggear, R. A. (2021). Manajemen pasca bencana kebakaran permukiman di Kabupaten Manokwari tahun 2021. *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 6(2), 78–89.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). *Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. (2025). *Infografis kebakaran dan penyelamatan evakuasi Kabupaten Sidoarjo periode 1 Januari – 30 September 2025*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Metadata statistik: Kompilasi data pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Sidoarjo*. <https://sirusa.bps.go.id>
- Clicks.id. (2022, Maret 9). *Pabrik sepatu terbakar, Tropodo-Pondok Candra*

- macet total*. Diakses dari <https://m.clicks.id/read/BIDnLB-pabrik-sepatu-terbakar-tropodo-pondok-candra-macet-total>
- Iasha, C. (2020). Implementasi kebijakan penempatan pos-pos badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 45–56.
- iNewsSidoarjo.id. (2026). *Kebakaran gudang rongsokan dan rumah kos di Jalan Tamasa Desa Tropodo Sidoarjo, kerugian ditaksir Rp 300 juta*. iNews Sidoarjo. Diakses dari <https://sidoarjo.inews.id>
- Kadji, Yulianto. 2020. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. Diakses melalui Repository Universitas Negeri Gorontalo.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Pohan, A. G. K., et al. (2021). Upaya mitigasi bencana kebakaran di pemukiman padat penduduk oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 5(1), 12–25.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 2013. Sidoarjo: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Penanggulangan Bencana. 2013. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Sidoarjoterkini.com. (2024, September 19). *Kebakaran hanguskan rumah warga di Desa Tropodo Waru*. Diakses dari <https://sidoarjoterkini.com/kebakaran-hanguskan-rumah-warga-di-desa-tropodo-waru/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.